

ABSTRAK

Judul skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek kehidupan masyarakat, khususnya di pusat penggilangan padi di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Terkadang buruh/pekerja diperlakukan kurang sesuai oleh pelaku usaha karena tidak mengertinya aturan yang ada. Buruh/pekerja yang seharusnya digaji dengan layak atas kerja kerasnya, sering dipangkas haknya untuk mendapatkan kelayakan upah tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan buruh lepas di pusat pengilingan padi yang ada di desa cungkup, menurut PERDA Kab. Lamongan dan menurut Fatwa DSN MUI tentang akad ijarah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang melakukan observasi atau riset langsung terhadap suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Yang mana mengambil sampel dari suatu kejadian kemudian ditarik ke contoh kasus dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan dan menghasilkan kesimpulan.

*Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian antara praktek pengupahan di pusat pengilingan padi yang ada di Desa Cungkup Kec. Pucuk kab. Lamongan, dengan PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. dan Berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan *ujrah* harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini yakni PERDA Kab. Lamongan. Adapun sistem pengupahan buruh tersebut termasuk dalam ijarah *ala asyakhsh*.*

Kata Kunci: Buruh. Perda. Fatwa.

ABSTRACT

This thesis is motivated by the societal practices, particularly in the rice milling center of Cungkup Village, Pucuk Sub-district, Lamongan Regency. At times, workers are treated inadequately by business operators due to a lack of understanding of existing regulations. These workers, who should receive fair wages for their hard work, often have their rights diminished in terms of remuneration. The purpose of this research is to investigate the practices of wage determination for casual laborers in the rice milling center of Cungkup Village, according to the Regional Regulation (PERDA) of Lamongan Regency and the Fatwa (religious edict) of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN MUI) concerning ijarah contracts.

A qualitative research design was employed, involving direct observation and field research to explore the phenomenon. This study utilizes a descriptive approach with an inductive analysis. Samples were selected based on specific incidents and subsequently analyzed using relevant theoretical frameworks to draw conclusions.

The findings of the research indicate inconsistencies between the wage practices in the rice milling center of Cungkup Village, Pucuk Sub-district, Lamongan Regency, and the Regional Regulation No.12 of 2018 concerning Labor Management issued by Lamongan Regency. Furthermore, according to Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, the wage determination should adhere to the applicable regulations, in this case, the Regional Regulation of Lamongan Regency. The wage system for laborers in this context falls within the concept of ijarah ala asyakhsh.

Keywords: Casual laborers, Regional Regulation, Fatwa.